

**ANALISIS EFISIENSI PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI PROPINSI DI INDONESIA
(APLIKASI MODEL DATA ENVELOPMENT ANALISYS)**

Sri Kusreni

(Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)

Abstract

Indonesia is a big country with 32 provinces. Tax and retribution is used by every province to increase their income. Hence, tax and Retribution is an important income source for regional government, as well as a part of public participation for regional development.

The problems in regional development are the contribution of tax and retribution is not significant. As one of regional income (PAD) components, tax and retribution may be not efficient. In Product Domestic Regional Bruto (PDRB) efficiency income concept is to optimalize value of money income, were is not only efficient in value but there must be effective. The aim of this research is to analysis output and input inefficiency in PAD for 30 provinces in Indonesia.

Using Data Envelopment Analysis (DEA) with assumption Constant Return To Scale from total input and output side, the results shows that the conditions from 22 provinces in Indonesia only 8 provinces are not efficient

Key word : Regional Income , PDRB, PAD, Efficien, DEA

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Isu utama dari PAD dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa PAD merupakan pencerminan dari *local taxing power* yang menurut sebagian pihak seyogyanya cukup signifikan besarnya. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa PAD secara umum hanya memiliki peran yang marjinal terhadap APBD.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan, otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Daerah pada umumnya dalam kaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi inefisiensi dalam penerimaan PAD dari pemungutan pajak dan retribusi daerah dibandingkan dengan biaya pemungutannya.

Hakikat efisiensi dalam rangka perencanaan penerimaan APBN/APBD, pada dasarnya adalah optimalisasi penerimaan APBN/APBD menyangkut nilai uang (*value of money*), yang meliputi tidak hanya nilai efisien akan tetapi juga ekonomis dan efektif (Ritonga, 2003). Ekonomis yaitu suatu cara kerja yang hemat dan bijaksana, atau setiap tindakan/kebijakan disebut ekonomis apabila penggunaan sumber

dana yang tersedia dapat memperoleh manfaat dengan kualitas dan kuantitas yang maksimal. *Efisien* yaitu aspek manfaat atau hasil yang optimal harus dapat dicapai dengan biaya (*cost*) yang relatif lebih kecil. Jadi, anggaran dapat meningkatkan efisiensi apabila dengan biaya yang relatif kecil dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan, atau dengan biaya yang sama dapat meningkatkan hasil yang dicapai. Sementara efektif yaitu hasil yang dicapai dari suatu pengeluaran dana sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jadi efektif lebih pada pencerminan kemampuan untuk mencapai "tepat sasaran".

Karenanya penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk menjawab pertanyaan seberapa besarkah efisiensi yang bisa dicapai dari berbagai komponen biaya yang muncul terkait dengan penerimaan daerah dari komponen PAD baik berupa pajak daerah, retribusi daerah maupun komponen penerimaan PAD yang lain di Propinsi di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur inefisiensi penerimaan PAD dari sisi outputnya (hasil penerimaan PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan komponen penerimaan PAD yang lain) dan dari sisi inputnya (biaya pemungutan pajaknya seperti biaya pegawai, biaya belanja barang dan jasa, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan, biaya modal, biaya bagi hasil dan bantuan keuangan, biaya lain-lain dan pengeluaran tidak terduga pada era desentralisasi fiskal di Propinsi di Indonesia pada tahun 2004.

METODE PENELITIAN

Pengukuran Efisiensi

Salah satu cara untuk mengukur kinerja suatu perusahaan adalah dengan efisiensi. Tingkat efisiensi yang dicapai merupakan cerminan dari kualitas kinerja sebuah perusahaan karena semakin tinggi efisiensi yang dicapai maka perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. Salah satu metode yang dipakai untuk mengukur suatu efisiensi adalah analisis rasio parsial, namun alat analisis tersebut memiliki kelemahan karena tidak bisa diterapkan pada kondisi tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Wibowo (2003) mengatakan bahwa memasuki era desentralisasi, rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota mengalami penurunan. Dilihat dari kabupaten/kota secara keseluruhan, kontribusi PAD terhadap total penerimaan sebelum desentralisasi mencapai 10,2 persen, turun menjadi 8,1 persen pada era desentralisasi, atau mengalami penurunan sebesar 2,1 persen. Kemampuan fiskal daerah untuk membiayai pengeluaran pada era desentralisasi menunjukkan penurunan apabila dibandingkan sebelum desentralisasi.

Model Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan menghitung rasio antara output dan input perusahaan. Data Envelopment Analysis (DEA) akan menghitung perusahaan yang menggunakan *input* n untuk menghasilkan output m yang berbeda (Miller dan Noulas;1996). Efisiensi diukur sbb ;

$$h_s = \frac{\sum_{i=1}^m u_i y_{is}}{\sum_{j=1}^n v_j x_{js}} \quad (1)$$

dimana :

h_s adalah efisiensi teknik UKE s

y_{is} merupakan jumlah output i yang diproduksi oleh UKE s .

x_{js} adalah jumlah input j yang digunakan oleh UKE s

u_i merupakan bobot output i yang dihasilkan oleh UKE s

v_j adalah bobot input j yang diberikan oleh UKE s , dan i dihitung dari 1 ke m serta j dihitung dari 1 ke n .

Persamaan di atas menunjukkan adanya penggunaan satu variabel input dan satu output. Rasio efisiensi (h_s), kemudian dimaksimalkan dengan kendala sebagai berikut :

$$\sum_{i=1}^m u_i y_{ir} / \sum_{j=1}^n v_j x_{jr} \leq 1 \quad \text{untuk } r = 1, \dots, N$$

(2) $U_i \text{ dan } V_j \geq 0$

dimana N menunjukkan jumlah UKE dalam sampel. Pertidaksamaan pertama menunjukkan adanya efisiensi rasio untuk UKE lain tidak lebih dari 1, sementara pertidaksamaan kedua berbobot positif. Angka rasio akan bervariasi antara 0 sampai dengan 1. Sebuah UKE dikatakan efisien apabila memiliki angka rasio mendekati 1 atau 100 persen, sebaliknya jika mendekati 0 menunjukkan efisiensi UKE yang semakin rendah.

HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Data Envelopment Analysis (DEA)

DEA digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi efisiensi relatif suatu unit kegiatan ekonomi/UKE (*Decision Making Unit/DMU*) suatu organisasi. Unit kegiatan ekonomi yang diaplikasikan dengan DEA di dalam penelitian ini mencakup **30 Propinsi di Indonesia**. Ada tiga manfaat yang diperoleh dari pengukuran efisiensi dengan DEA (Insukindro dkk, 2000:8), pertama, sebagai tolok ukur untuk memperoleh efisiensi relatif yang berguna untuk mempermudah perbandingan antar unit ekonomi yang sama. Kedua, mengukur berbagai variasi efisiensi antar unit ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, dan, ketiga, menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan tingkat effisiensinya.

Dari hasil perhitungan DEA dengan asumsi *Constant Return To Scale* (CRTS) seperti yang tertera pada Tabel 1., terlihat bahwa sebagian besar propinsi di Indonesia sudah mengalami capaian efisien penuh (sebesar 100%) .

Efisiensi distribusi akan tercapai bila barang jasa terdistribusi ke masyarakat yang dapat memperoleh manfaat sebesar besarnya. Penghitungan efisiensi biasanya didasarkan pada perhitungan Pareto Optimal, dimana situasi dianggap optimal bila tidak ada lagi individu yang akan menjadi lebih baik tanpa menyebabkan seseorang lain menjadi lebih buruk. Ada 4 hal agar kondisi Pareto Optimal tercapai: pertama, *marginal rates of substitution*

untuk konsumsi adalah sama untuk semua konsumen, agar tidak ada konsumen yang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan orang lain menjadi lebih buruk; Kedua. *marginal rate of transformation* untuk produksi adalah sama untuk semua produk, sehingga tidak akan meningkatkan produksi atas suatu barang tanpa menyebabkan penurunan produksi atas barang lain; Ketiga. *marginal physical product* dari suatu faktor produksi adalah sama untuk semua perusahaan yang memproduksi barang tersebut; Keempat. *marginal rates of substitution* dalam mengkonsumsi adalah sama dengan *marginal rates of transformation* suatu produksi, agar terjadi ketepatan dalam produksi dan keinginan konsumen.

Bila terjadi inefisiensi maka Public Choice Pareto Optimal akan terganggu Pengeluaran pemerintah tidak selalu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, bisa berdampak negatif jika terjadi inefisiensi pada pengeluaran pemerintah. Inefisiensi akan terjadi bila terjadi antara lain adanya bias Pajak dan tarif. Sumber inefisiensi Pengeluaran pemerintah terdiri dari **pertama** : pengeluaran pemerintah untuk suatu program yang tidak bisa memenuhi tujuan intervensi pemerintah. kedua Barang dan jasa diproduksi pemerintah tidak pada kondisis minimum. Ketiga Pemerintah melakukan suatu aktivitas yang sebenarnya lebih efisien kalau dikerjakan oleh swasta.

Berdasarkan Tabel 1 dilihat dari sisi *input* total dan *output* total terdapat 22 Propinsi di Indonesia yang sudah memenuhi efisien yaitu Propinsi Bali, Propinsi Bangka Belitung, Propinsi Banten, Propinsi Gorontalo, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi NTB, Propinsi Sulawesi Tengah, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Jambi, Propinsi Kalimantan Selatan, Propinsi Kep. Riau, Propinsi NTT, Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Kalimantan Selatan, Propinsi NAD, Propinsi Sulawesi

Tengah, Propinsi Sumatera Barat, DI Yogyakarta.

Sedangkan Propinsi yang belum memenuhi efisiensi dari sisi *input* total dan *output* totalnya ada 8 Propinsi yaitu Propinsi Lampung (52,06;58,16), Propinsi Kalimantan Barat (60,82;60,10), Propinsi Maluku Utara (71,88;64,), Propinsi Sulawesi Selatan (85,78;84,97), Propinsi Maluku (85,83 ;70,93) , Propinsi Bengkulu (85,84;75,20) , Propinsi Riau (86.31;59,31) dan Propinsi Papua. (89,25;76,34).

Tabel 1 CAPAIAN EFISIENSI INPUT, OUTPUT DAN KOMPONENNYA DENGAN ASUMSI CONSTANT RETURN TO SCALE

NO	PROVINSI	CAPAIAN EFISIENSI (%)		CAPAIAN EFISIENSI (dalam %)										OUT PUT			
		INPUT	OUTPUT	INPUT										TAX	RETRIBUSI	HPMD	LAIN- 2 PAD
				BLJ PEGAWAI	BLJ BRG&JASA	BLJ DINAS	BLJ PEME LIHARAAN	BLJ MODAL	BAGI HSL & BANTUAN	PENG TDK TERDUGA	TAX	RETRIBUSI	HPMD				
1	LAMPUNG	52.06	58.16	27.90	52.10	52.10	33.89	26.60	52.10	47.30	52.10	80.40	100.00	49.38	100.00		
2	KALBAR	60.82	60.10	60.80	51.20	33.89	31.80	31.80	60.80	60.80	60.80	100.00	100.00	1.00	100.00		
3	MALUKU UTARA	71.88	64.56	71.90	71.90	45.90	42.10	42.10	71.90	45.40	71.90	89.30	100.00	0.00	100.00		
4	SULSEL	85.78	84.87	81.10	85.80	62.00	82.20	82.20	85.80	85.80	85.80	77.10	100.00	100.00	100.00		
5	MALUKU	85.83	70.93	85.80	80.00	70.50	85.80	85.80	85.80	85.80	32.30	53.90	100.00	5.50	100.00		
6	BENGKULU	85.84	75.20	70.40	61.30	85.80	52.90	52.90	85.80	85.80	58.30	100.00	100.00	27.28	100.00		
7	RIAU	86.31	59.31	86.30	36.40	60.24	61.40	61.40	17.50	57.80	42.60	69.20	100.00	100.00	21.00		
8	PAPUA	89.25	76.34	89.30	71.24	89.30	89.30	89.30	89.30	89.30	28.50	80.98	49.80	63.00	100.00		
9	BALI	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
10	BANGKA BLTG	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
11	BANTEN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
12	GORONTALO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
13	JABAR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
14	JATIM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
15	KALTIM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
16	NTB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
17	SULTENG	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
18	SUMSEL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
19	JAMBI	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
20	KALSEL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
21	KEP. RIAU	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
22	NTT	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
23	SULUT	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
24	SUMUT	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
25	JATENG	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
26	KALTENG	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
27	NAD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
28	SULTENG	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
29	SUMBAR	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
30	YOGJAKARTA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

Sumber: BPS 2005, diolah peneliti.

Berikut ini analisis capaian efisiensi dari sisi *input* dan *output* untuk ke-8 propinsi di Indonesia yang belum memenuhi efisiensi penuh 100%).

Sumber Inefisiensi di Propinsi Lampung

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Propinsi Lampung dicapai oleh pos belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja perjalanan dinas yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 52,10 %, sehingga masih ada pemborosan input sebesar 47,90 %. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos belanja pemeliharaan sebesar 26,60 %, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 73,40 %. Dari target yang sebesar Rp. 6.261.939.300 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp. 12.028.298.000 yaitu sebesar 200% (2x) dari yang seharusnya sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos belanja pemeliharaan ini.

Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan Lain-lain PAD sebesar 100 %, berarti capaian *output* ini sudah maksimal.. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah HPMD sebesar 49,38 %. Artinya dari target pajak sebesar Rp. 9.081.760.700 yang terealisasi baru Rp. 4.474.900.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi sekitar Rp. 5 trilyun.

Sumber Inefisiensi di Propinsi Kalbar

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Propinsi Kalimantan Barat dicapai oleh pos belanja pegawai, bagi hasil & bantuan, pengeluaran tak terduga dan belanja modal yang masing-

masing telah mencapai efisiensi sebesar 60,80 %, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 39,20 %. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh belanja pemeliharaan sebesar 31,80 %, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 68,20 %. Dari target yang sebesar Rp.44.806.837.300, ternyata realisasinya sebesar Rp. 141.009.608.000 1.200.198.000, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos belanja pemeliharaan ini.

Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan pajak masing-masing sebesar 100 %. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah HPMD sebesar 1,00 %. Artinya dari target HPMD sebesar Rp. 10.660.226.100 yang terealisasi baru Rp. 110.000.000, sehingga perlu ada upaya yang lebih serius dalam peningkatan *output* .

Sumber Inefisiensi di Propinsi Maluku Utara

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Propinsi Maluku Utara dicapai oleh pos belanja modal dan , belanja barang dan jasa , belanja pegawai yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 71,90 %, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 28,10 %. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos belanja pemeliharaan sebesar 42,1 %, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 47,9 %. Dari target yang sebesar Rp 8.360.211.100 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp. 19.852.928.000 atau 200% (2 x) dari yang seharusnya, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari belanja pemeliharaan ini.

Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan Lain-lain PAD sebesar 100 %.. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah Hasil Perusahaan Milik Daerah sebesar 0.00 %. Artinya dari target Hasil Perusahaan Milik Daerah sebesar Rp.1.933.004.000 , yang terealisasi baru Rp 0,00, sehingga perlu ada upaya kerja keras yang serius dalam menangani HPMD dapat output dapat terealisasi.

Sumber Inefisiensi di Propinsi Sulawesi Selatan

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Propinsi Sulawesi Selatan dicapai oleh pos belanja barang dan jasa, bagi hasil & bantuan dan pengeluaran tak terduga yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 85,80 %, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 14,20 %. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos biaya perjalanan dinas sebesar 62,00 %, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 38,00 %. Dari target yang sebesar Rp. 29.448.040.100 , ternyata realisasinya sebesar Rp.47.518.576.000 atau 150 % (1,5 x) dari yang seharusnya, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos belanja perjalanan dinas ini.

Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan HPMD sebesar 100 %. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah pajak sebesar 77,10 %. Artinya dari target pajak sebesar Rp.150.544.491.000, yang terealisasi baru Rp. 116.048.063.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi sekitar Rp. 34 trilyun

Sumber Inefisiensi di Propinsi Maluku

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Propinsi Maluku dicapai oleh pos belanja pegawai, belanja pemeliharaan, bagi hasil & bantuan dan belanja modal yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 85,80%, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 14,20 %. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos pengeluaran tak terduga sebesar 32,30 %, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 67,70 %. Dari target yang sebesar Rp.6.907.885.800 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp. 21.371.794.000 atau 300% (3x) dari yang seharusnya, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos pengeluaran tak terduga ini.

Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi *output* tertinggi dicapai oleh pos Lain-lain PAD sebesar 100 %. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah HPMD sebesar 5,50 %. Artinya dari target pajak sebesar Rp. 11.637.883.600, yang terealisasi baru Rp.636.423.000, sehingga perlu ada usaha yang serius dalam upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi sekitar Rp. 11 trilyun.

Sumber Inefisiensi di Propinsi Bengkulu

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Propinsi Bengkulu dicapai oleh pos belanja modal, bagi hasil & bantuan dan belanja perjalanan dinas yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 85,80 %, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 14,20 %. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos belanja pemeliharaan sebesar 52,90 %, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 47,10 %. Dari target yang sebesar Rp 17.489.461.900 rupiah, ternyata

realisasinya sebesar Rp. 33.072.553.000 atau 200% (2 x) dari yang seharusnya, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos belanja pemeliharaan ini.

Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi output tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan lain-lain pajak sebesar 100 %. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah HPMD sebesar 27,28 %. Artinya dari target pajak sebesar Rp. 1.221.609.000, yang terealisasi baru Rp. 331.750.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan output yang lebih besar lagi sekitar Rp. 900 milyar.

Sumber Inefisiensi di Propinsi Riau

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Propinsi Riau dicapai oleh pos belanja pegawai yang telah mencapai efisiensi sebesar 86,30 %, sehingga masih ada pemborosan *input* sebesar 13,70 %. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos belanja modal sebesar 17,50 %, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 82,500 %. Dari target yang sebesar Rp.398.660.270.100 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp. 2.281.768.570.000 atau 600% (6x) dari yang seharusnya, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos belanja modal ini.

Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi output tertinggi dicapai oleh pos retribusi dan HPMD sebesar 100 %. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah lain-lain bukan PAD sebesar 21,05 %. Artinya dari target pajak sebesar Rp. 48.620.836.200, yang terealisasi baru Rp.10.211.131.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan output yang lebih besar lagi sekitar Rp. 38,5 trilyun

Sumber Inefisiensi di Propinsi Papua

Dari sisi komponen *input*, capaian efisiensi tertinggi di Propinsi Papua dicapai oleh pos belanja pegawai, belanja pemeliharaan, belanja modal, belanja perjalanan dinas dan bagi hasil & banyuan yang masing-masing telah mencapai efisiensi sebesar 89,30 %, sehingga masih ada pemborosan input sebesar 11,70 %. Capaian efisiensi *input* terendah dicapai oleh pos pengeluaran tak terduga sebesar 28,50 %, sehingga terjadi pemborosan *input* yang cukup besar yaitu 72,60 %. Dari target yang sebesar Rp.31.268.977.600 rupiah, ternyata realisasinya sebesar Rp. 109.525.540.000 atau 300% (3 x) dari yang seharusnya, sehingga perlu ada peningkatan efisiensi dari pos pengeluaran tak terduga ini.

Sementara dari komponen *output*, capaian efisiensi output tertinggi dicapai oleh pos pajak sebesar 89,98 %, sehingga capaian *output* ini masih bisa ditingkatkan lagi sebesar 20,02 %. Pos yang mengalami capaian *output* terendah adalah retribusi sebesar 49,80 %. Artinya dari target retribusi sebesar Rp.61.113.926.600, yang terealisasi baru Rp. 30.415.628.000, sehingga perlu ada upaya peningkatan *output* yang lebih besar lagi sekitar Rp. 30 trilyun.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Dari hasil perhitungan DEA dengan asumsi CRTS Propinsi yang sudah mengalami capaian efisien penuh (sebesar 100%) dari sisi *input* total dan *output* total ada 22 Propinsi. Diantaranya adalah propinsi Bali, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, Sulawesi Tengah, Sumatera

2. Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Kep. Riau, NTT, Sulawesi Utara, Sulamatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, NAD, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar propinsi di Indonesia sudah efisien
3. Propinsi yang belum memenuhi efisiensi dari sisi input total dan output ada 8 Propinsi yaitu Lampung (52,06;58,16), Kalimantan Barat (60,82;60,10), Maluku Utara (71,88;64,56), Sulawesi Selatan (85,78;84,97), Maluku (85,83 ;70,93) , Bengkulu (85,84;75,20) , Riau (86.31;59,31) dan Papua. (89,25;76,34).
4. Sumber inefisiensi yang terbesar dari sisi input masing-masing adalah pengeluaran tidak terduga untuk Lampung , Kalbar, Sulsel,Malulku, Bengkulu Riau dan Papua.Untuk Belanja perjalanan dinas (Bengkulu), belanja pemeliharaan (Sulawesi Selatan,Maluku,Papua), danbelanja pegawai (Sulawesi Selatan, Maluku, Riau,Papua). Kedua pos yang pertama (pengeluaran tidak terduga dan belanja perjalanan dinas) ini perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan di tingkat Propinsi, karena biaya yang dikeluarkan untuk kedua pos ini sering tidak tepat sasaran sehingga terjadi pemborosan yang cukup besar. Sebagai contoh pengeluaran tidak terduga (sering disebut "dana taktis") yang sifatnya fleksible dan akuntabilitasnya cukup longgar, sering digunakan oleh aparat di tingkat daerah dalam mengeluarkan biaya-biaya yang tidak direncanakan sebelumnya. Pos yang kedua adalah belanja perjalanan dinas. Perjalanan

dinas yang sering dilakukan oleh aparat terkadang tidak berkorelasi dengan manfaat yang seharusnya diperoleh. Atau dengan kata lain, perjalanan dinas yang tidak ada kaitannya dengan peningkatan output penerimaan daerah, sebaiknya dikurangi.

5. Sumber inefisiensi terbesar dari sisi output masing-masing adalah Hasil Perusahaan Milik Daerah/HPMD (Kalimantan Barat, Maluku) Pos ini sering dijadikan "lahan basah" bagi aparat sehingga antara target dan realisasi tidak sama. Terlalu banyak kepentingan yang bermain memungkinkan perusahaan daerah tidak pernah menghasil barang ataupun jasa secara lebih efisien. Biarkan perusahaan daerah diserahkan kepada para profesional yang mengelolanya sehingga mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat tapi juga pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln ,2004, Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Yogyakarta, BPFE Universitas Gajah Mada
- Darwanto,Herry,2007 , Perkembangann Pemikiran Ekonomi, Jakarta , Raja Grafindo
- Banker, R.D., Charnes, A., And. Cooper, W.W., 1984, "Some Models For Estimating Technical And Scale Efficiencies In Data Envelopment Analysis", *Management Science* 30 (9), 1079-1092.

- Boediono, 2002, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Asas Desentralisasi Fiskal, *Makalah Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional Tahun 2002*, Jakarta.
- Davey, Kenneth, 1989, *Keuangan Pemerintah Indonesia*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Indonesia*, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Farell, M.J, 1957, "The Measurement Of Productive Efficiency", *Journal Of The Royal Statistical Society* 120 (Series A), 253-281 Halim, Abdul, 2001, *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Laporan Studi Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keuangan Daerah Di Indonesia, LPEM Universitas Indonesia Bekerjasama Dengan Clean Urban Project, RTI, Jakarta, 1999
- Mahfud, Sidik. 2001, *Desentralisasi Fiskal*, Makalah Seminar Nasional FE UNAIR, Surabaya.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*, Jurnal Ekonomi Rakyat, Nomor 4 – Juli 2002.
- Mangkoesebroto, G. 1999. *Ekonomi Publik*. BPFE. Yogyakarta. Indonesia.
- Musgrave, Richard A, 1993, *Public Finance In Theory And Practice*, Fifth Edition, Mcgraw-Hill Book Company, USA.
- Nota Keuangan Dan RAPBN , Beberapa Edisi.
- Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM, 2000, "*Modul Data Envelopment Analysis (DEA)*", Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Republik Indonesia, . "Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah".
- Republik Indonesia, "Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah".
- Republik Indonesia, "Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah".
- Simanjuntak, 2002, *Fiscal Need Dan Fiscal Capacity Dalam Rangka Optimalisasi PAD*, Departemen Keuangan
- Suparmoko, 2000, *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek*, BPFE UGM, Yogyakarta.